

ANDIK YULIANTO

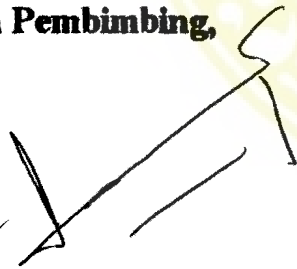
ANDIK YULIANTO

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA ASING (TKA) DI INDONESIA

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing,



Lanny Ramli, S.H., M.Hum.
NIP. 131 878 388

Penyusun,



Andik Yulianto
NIM. 039710186 U

**FAKULTAS HUKUM PROGRAM EKSTENSI
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2002**

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

- Pada dasarnya sistem pengupahan yang berlaku terhadap Tenaga Kerja Asing adalah sama dengan Tenaga Kerja Lokal. Tetapi dalam hal ini terdapat perbedaan dalam hal besarnya upah mengingat Tenaga Kerja Asing pada umumnya merupakan tenaga kerja ahli yang menempati posisi tingkat managerial. Selain itu upah yang diberikan kepada TKA dalam bentuk mata uang asing yaitu US Dollar (US \$) dimana pembayarannya harus dengan kurs resmi.
- Dalam hal Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA) yang berada di wilayah Indonesia berlaku hukum Indonesia yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1964 tentang PHK di Perusahaan Swasta. Adapun PHK terhadap TKA harus dengan ijin P4D atau P4P sebagaimana diberlakukan terhadap Tenaga Kerja Lokal. Hal ini dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap TKA agar pengusaha tidak sewenang-wenang dalam bertindak dan memperlakukannya.

4.2. Saran

- Penggunaan Tenaga Kerja Asing di suatu perusahaan hendaknya dibatasi baik dalam jumlah maupun jangka waktu penggunaannya. Hal ini karena harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku mengingat prioritas dari tenaga

kerja adalah Tenaga Kerja Lokal yang jumlahnya semakin membengkak dengan pengetahuan dan pengalaman yang memadai. Sehingga peran tenaga pendamping yang perlu dioptimalkan bagi perkembangan Tenaga Kerja Lokal dan pada akhirnya mampu menggantikan Tenaga Kerja Asing untuk melaksanakan efisiensi yang dapat menekan biaya produksi.

- Berkaitan dengan penggunaan Tenaga Kerja Asing yang masih diperlukan untuk jabatan-jabatan yang belum dapat digantikan dengan Tenaga Kerja Lokal, maka terhadapnya perlu diberikan perlindungan hukum dalam segala bentuk yang sesuai dengan kapasitasnya sebagai tenaga ahli sehingga tujuan dari penggunaan Tenaga Kerja Asing tersebut dapat tercapai tanpa menimbulkan kesenjangan yang mencolok antara Tenaga Kerja Asing dengan Tenaga Kerja Lokal.